

## PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MEMPENGARUHI PENDAPATAN NASIONAL: KAJIAN EKONOMI PUBLIK DI INDONESIA

Ella Amelia<sup>1</sup>, Hendra Riofita<sup>2</sup>

UIN Suska Riau<sup>1,2</sup>

[ameliaella0606@gmail.com](mailto:ameliaella0606@gmail.com)<sup>1</sup>, [hendrariofita@yahoo.com](mailto:hendrariofita@yahoo.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Published : 16 June 2026

#### Keywords

Kebijakan Fiskal, Pendapatan Nasional, APBN, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak, Belanja Pemerintah

*Fiscal Policy, National Income, State Budget, Economic Growth, Taxes, Government Spending*



© Author(s) 2026  
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mengelola perekonomian nasional. Melalui pengelolaan penerimaan negara (perpajakan) dan pengeluaran negara (belanja pemerintah), kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini mengkaji secara komprehensif hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional Indonesia, meliputi landasan teori ekonomi Keynesian, instrumen kebijakan fiskal, analisis APBN, serta dampak positif dan negatif dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berkualitas dan berorientasi pada sektor produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti rendahnya kepatuhan pajak, ketimpangan pembangunan, dan risiko defisit anggaran.*

*Fiscal policy is one of the main instruments used by the Indonesian government to manage the national economy. Through the management of state revenues (taxation) and state expenditures (government spending), fiscal policy has a significant impact on national income, economic growth, poverty levels, and public welfare. This paper comprehensively examines the relationship between fiscal policy and Indonesia's national income, encompassing the theoretical foundations of Keynesian economics, fiscal policy instruments, state budget analysis, and the positive and negative impacts of its implementation. The study demonstrates that a high-quality fiscal policy oriented toward productive sectors can foster inclusive and sustainable economic growth, despite facing various structural challenges such as low tax compliance, development inequality, and the risk of budget deficits.*

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengelola perekonomiannya agar dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal memainkan peranan yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Kebijakan fiskal bukan sekadar urusan teknis pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan cerminan dari visi, prioritas, dan komitmen pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat, adil, dan berdaya saing tinggi.<sup>1</sup>

Sejak era reformasi bergulir pada akhir tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam pengelolaan kebijakan fiskalnya. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang menghantam Indonesia dengan sangat keras menjadi pelajaran pahit sekaligus titik balik penting yang mendorong pembenahan menyeluruh dalam tata kelola keuangan negara. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi pengelolaan fiskal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berbagai reformasi perpajakan juga dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak.<sup>2</sup>

Di era kontemporer, tantangan kebijakan fiskal semakin kompleks. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memaksa pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah fiskal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, termasuk memperlebar batas defisit anggaran melampaui tiga persen dari PDB selama tiga tahun berturut-turut demi membiayai program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, tekanan-tekanan struktural seperti rendahnya rasio pajak terhadap PDB, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan ketergantungan pada komoditas primer masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan jangka panjang dan komitmen politik yang kuat.<sup>3</sup>

Relevansi kajian tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik yang meningkat, transisi energi, dan revolusi teknologi digital semuanya memberikan dampak yang tidak kecil terhadap postur fiskal dan kemampuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transmisi kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional menjadi prasyarat

---

<sup>1</sup> Dassucik Dassucik Dan Ida Farida, "Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang," *Penerbit Tahta Media* 1, No. 1 (2025): 115–125.

<sup>2</sup> Muhammad Nur Abdi, "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)," *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, No. 1 (2020): 90–98.

<sup>3</sup> M Aldi Jaya Kusuma, "Tantangan Pembangunan Dan Hukum Di Indonesia Pasca Pandemic Covid-19," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, No. 2 (2022): 100–108.

penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam memengaruhi pendapatan nasional Indonesia dalam perspektif ekonomi publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pendapatan nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara kebijakan perpajakan, pengeluaran pemerintah, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kebijakan Fiskal dan Pendapatan Nasional**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi kondisi perekonomian nasional.<sup>5</sup> Dalam ekonomi publik, kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan instrumen pajak dan belanja negara untuk mengendalikan aktivitas ekonomi agar tetap berjalan secara seimbang. Pendapatan nasional sendiri merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Besarnya pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>6</sup>

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengelolaan dua komponen utama, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara diperoleh terutama dari sektor perpajakan, termasuk pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, serta berbagai jenis pungutan resmi lainnya. Sementara itu, pengeluaran negara meliputi belanja pemerintah pusat seperti pembangunan

---

<sup>4</sup> Hendra Riofita, "Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan," *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 2, No. 1 (2016): 85–104.

<sup>5</sup> Fauziah Aqmarina Dan Imahda Khoiri Furqon, "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2020): 255–274.

<sup>6</sup> Fitri Diana Dan Hendra Riofita, "Riset Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran Telkomsel," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, No. 5 (2024).

infrastruktur, pembayaran gaji aparatur negara, subsidi, bantuan sosial, serta transfer ke daerah dan dana desa.<sup>7</sup>

Tujuan utama kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui stimulasi permintaan agregat dan peningkatan produktivitas. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan mempertahankan nilai tukar rupiah. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran dengan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program-program sosial dan subsidi yang tepat sasaran.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat penting karena pemerintah menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengatur kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang disusun setiap tahun. APBN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran negara, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat karena permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Pendapatan nasional merupakan ukuran agregat atas nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.<sup>9</sup> Konsep ini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu bangsa. Terdapat beberapa ukuran pendapatan nasional yang lazim digunakan dalam analisis ekonomi makro, antara lain:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara, tanpa memandang kewarganegaraan pelakunya. PDB merupakan indikator paling umum digunakan untuk mengukur ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
2. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu bangsa, baik di dalam maupun di luar negeri. PNB memperhitungkan pendapatan yang diperoleh warga negara Indonesia yang

---

<sup>7</sup> Hendra Riofita, "Strategi Pemasaran," in *Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra*, 2015.

<sup>8</sup> Amanda Mutiara Et Al., "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 7 (2024): 212–226.

<sup>9</sup> Lela Puspitasari, "Instrumen Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2025): 61–75.

bekerja atau berinvestasi di luar negeri, dikurangi pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia.

3. Pendapatan per Kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk total. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat suatu negara, meski tidak mencerminkan distribusi pendapatan secara merata.

Hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional bersifat sangat erat dan dinamis. Perubahan dalam kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah akan secara langsung memengaruhi komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal sebagai alat untuk mengarahkan perekonomian menuju sasaran-sasaran makroekonomi yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan internasional. Salah satu komponen yang paling besar pengaruhnya adalah pengeluaran pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal. Ketika pemerintah mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara efektif, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih stabil. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional menjadi sangat penting untuk dikaji dalam ekonomi publik Indonesia.

### **Teori Ekonomi Publik tentang Kebijakan Fiskal**

Dalam teori ekonomi publik, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan menstabilkan perekonomian nasional. Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam kebijakan fiskal adalah teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Menurut teori Keynes, pemerintah harus aktif melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi atau krisis ekonomi.<sup>11</sup> Intervensi tersebut dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan beban pajak agar permintaan masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya permintaan agregat, perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga pendapatan nasional juga mengalami peningkatan.

---

<sup>10</sup> Aldi Riyadi, "Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* 10, No. 1 (2026): 48–59.

<sup>11</sup> Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, Dan Bonaraja Purba, "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (Jimea)* 1, No. 1 (2023): 1–7.

Hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional dapat dijelaskan melalui persamaan pendapatan nasional berikut.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dalam persamaan tersebut, Y menunjukkan pendapatan nasional, C menunjukkan konsumsi rumah tangga, I menunjukkan investasi, G menunjukkan pengeluaran pemerintah, dan X-M menunjukkan selisih ekspor dan impor. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor utama pembentuk pendapatan nasional. Ketika pemerintah meningkatkan belanja negara, maka produksi barang dan jasa juga meningkat karena permintaan masyarakat bertambah. Kondisi tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Selain teori Keynes, teori multiplier effect juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak berlipat terhadap perekonomian. Ketika pemerintah membangun infrastruktur atau memberikan bantuan sosial, masyarakat akan memperoleh pendapatan tambahan yang kemudian digunakan untuk konsumsi. Konsumsi tersebut akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha sehingga aktivitas ekonomi terus berputar. Dampak berantai inilah yang disebut sebagai efek pengganda dalam ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi negara.<sup>12</sup>

### **Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Kebijakan fiskal di Indonesia dijalankan melalui dua instrumen utama yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara.<sup>13</sup> Penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan perusahaan. Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak ekspor-impor, dan pajak daerah. Pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan alat pengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak sesuai kondisi ekonomi yang sedang terjadi.

Selain pajak, pemerintah juga menggunakan pengeluaran negara sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dilakukan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Belanja negara yang produktif akan menciptakan lapangan kerja baru

---

<sup>12</sup> Jalaluddin Iman Rahadianto, Ignatia Martha Hendrati, Dan Wiry Wardaya, "Analisis Multiplier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kontribusi Ekonomi Di Negara-Negara G20 Berdasarkan Teori Keynes," *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, No. 1 (2026): 158–169.

<sup>13</sup> Roy Abdul Huda Et Al., "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang," *Kalianda Halok Gagas* 7, No. 2 (2024): 189–201.

dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi, konsumsi rumah tangga juga meningkat sehingga pendapatan nasional mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kualitas pengeluaran pemerintah sangat menentukan keberhasilan kebijakan fiskal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan fiskal modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi investor untuk meningkatkan investasi domestik dan asing. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan efisiensi administrasi negara. Pemerintah juga meningkatkan belanja negara pada sektor infrastruktur dan teknologi digital agar produktivitas ekonomi nasional meningkat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal memiliki peranan strategis dalam memengaruhi pendapatan nasional Indonesia.

### **Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pendapatan Nasional**

Kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan nasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran negara, permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat sehingga produksi nasional bertambah. Peningkatan produksi tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Bertambahnya lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional juga mengalami peningkatan.<sup>14</sup>

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional dapat terlihat melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri mampu memperlancar distribusi barang dan jasa di berbagai daerah. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menarik investasi baru yang menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan meningkatnya investasi dan kesempatan kerja, pendapatan nasional akan meningkat secara bertahap.

Kebijakan fiskal juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi ketika terjadi krisis. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia meningkatkan pengeluaran negara melalui bantuan sosial, subsidi kesehatan, dan dukungan bagi UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah penurunan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi alat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional dalam situasi krisis.

---

<sup>14</sup> Arnetta Alisyah Bahtiar Et Al., "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Keuangan Di Indonesia," *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 20, No. 2 (2025): 91–100.

### **Analisis APBN Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal di Indonesia. APBN digunakan untuk mengatur penerimaan negara dan pengeluaran negara agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik maupun global. Melalui APBN, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, APBN memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia.

Pengeluaran pemerintah dalam APBN memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah meningkatkan belanja negara pada sektor produktif, maka permintaan terhadap tenaga kerja dan barang produksi akan meningkat. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin kuat.<sup>15</sup>

Namun, pelaksanaan APBN juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Salah satu tantangan terbesar adalah terjadinya defisit anggaran ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Defisit anggaran biasanya ditutupi melalui pinjaman atau penambahan utang negara. Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan utang dapat membebani keuangan negara di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan APBN dilakukan secara efisien, produktif, dan tepat sasaran agar mampu meningkatkan pendapatan nasional.<sup>16</sup>

### **Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal memberikan banyak dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran menurun. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal juga dapat meningkatkan investasi karena pemerintah menyediakan fasilitas dan

---

<sup>15</sup> Hendra Riofita, "Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions," *Muslim Business And Economic Review* 1, No. 2 (2022): 257–280.

<sup>16</sup> Eri Nurhayana Dan Daryono Soebagiyo, "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022," *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 4, No. 2 (2023): 106–119.

infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Dengan meningkatnya investasi dan konsumsi masyarakat, pendapatan nasional akan mengalami pertumbuhan.<sup>17</sup>

Selain memberikan dampak positif, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Pengeluaran pemerintah yang terlalu besar dapat menyebabkan defisit anggaran dan peningkatan utang negara. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat secara berlebihan, inflasi juga dapat terjadi. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan ekonomi menurun. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Dampak negatif lainnya adalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang berlebihan. Jika masyarakat terlalu bergantung pada subsidi dan bantuan sosial, produktivitas ekonomi dapat menurun dalam jangka panjang. Pemerintah juga dapat mengalami kesulitan keuangan apabila penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran yang terus meningkat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang secara hati-hati agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Keseimbangan antara pengeluaran negara dan penerimaan negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.<sup>18</sup>

### **Tantangan Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat sehingga penerimaan negara belum optimal. Banyak wajib pajak yang belum melaporkan pendapatan secara benar atau belum membayar pajak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengalami keterbatasan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Akibatnya, pemerintah sering mengalami defisit anggaran yang harus ditutupi melalui utang negara.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga daerah lain belum memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Ketimpangan tersebut menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan masyarakat antarwilayah semakin besar. Selain itu, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di beberapa daerah masih terbatas. Kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas masyarakat dan memengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional.

Masalah korupsi dan kebocoran anggaran juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia. Penyalahgunaan anggaran negara menyebabkan dana pembangunan tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, birokrasi yang lambat

---

<sup>17</sup> Riofita, "Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions."

<sup>18</sup> Fitri Mustika Sari Et Al., "Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia," *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation* 1, No. 4 (2024): 1–10.

dan kurang efisien dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Jika masalah tersebut tidak diatasi, maka efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan pendapatan nasional akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>19</sup>

### **Strategi Optimalisasi Kebijakan Fiskal**

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Reformasi perpajakan bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan meningkatnya penerimaan negara, pemerintah akan memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional.

Selain reformasi perpajakan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengeluaran negara agar lebih produktif dan tepat sasaran. Belanja negara sebaiknya diprioritaskan pada sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur. Investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah dapat diberikan melalui bantuan modal usaha, subsidi bunga kredit, pelatihan keterampilan, dan akses pasar digital. Selain itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dan politik agar investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan strategi kebijakan fiskal yang tepat, pendapatan nasional Indonesia dapat meningkat secara inklusif dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang komprehensif di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan analisis akhir yang penting mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pendapatan nasional Indonesia. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat besar dan menentukan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Melalui dua instrumen utamanya, yaitu pengelolaan perpajakan di sisi

---

<sup>19</sup> Sumardi Adiman, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia: Tinjauan Literatur Atas Strategi Dan Tantangan Kebijakan Fiskal," *Educational Studies And Research Journal* 2, No. 2 (2025): 117–124.

penerimaan dan pengelolaan belanja negara di sisi pengeluaran, pemerintah memiliki kemampuan yang signifikan untuk memengaruhi arah, kecepatan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kerangka teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah secara langsung meningkatkan permintaan agregat dan, melalui efek multiplier, menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari nilai pengeluaran awal itu sendiri. Kebijakan pajak yang tepat juga berperan dalam memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi sektor swasta, yang merupakan komponen dominan dalam struktur PDB Indonesia.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional sangat bergantung pada kualitas pengelolaan APBN dan kondisi stabilitas ekonomi yang melingkupinya. Kebijakan fiskal yang terancang dengan baik, didukung oleh sistem administrasi yang efisien dan akuntabel, diterapkan pada waktu yang tepat dan dengan kalibrasi yang cermat, serta dikomunikasikan secara transparan kepada publik akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan kebijakan yang sama namun diimplementasikan dengan buruk. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi tinggi, nilai tukar yang bergejolak, atau ketidakpastian global yang intens, dapat mereduksi efektivitas stimulus fiskal secara signifikan. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia menjadi sangat esensial.

Akhirnya, sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh sektor masyarakat diperlukan agar kebijakan fiskal mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun perekonomian yang tangguh dan berkeadilan. Sektor swasta, dengan segala kapasitas investasi dan inovasinya, memerlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai yang hanya dapat disediakan oleh pemerintah. Masyarakat sipil, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan media, berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal agar tetap akuntabel, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Dunia usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, membutuhkan akses permodalan, pasar, dan teknologi yang difasilitasi oleh kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Hanya melalui sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa inilah kebijakan fiskal dapat menjadi mesin yang sesungguhnya bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muhammad Nur. "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, No. 1 (2020): 90–98.
- Adiman, Sumardi. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia: Tinjauan Literatur Atas Strategi Dan Tantangan Kebijakan Fiskal." *Educational Studies And Research Journal* 2, No. 2 (2025): 117–124.
- Aqmarina, Fauziah, Dan Imahda Khoiri Furqon. "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2020): 255–274.
- Aruan, Nur Indah Melani, Irma Hutagalung, Dan Bonaraja Purba. "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (Jimea)* 1, No. 1 (2023): 1–7.
- Bahtiar, Arnetta Alisyah, Maulidya Chandra Pandini, Sita Tsalitsa, Dan Rinny Meidiyustiani. "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Keuangan Di Indonesia." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 20, No. 2 (2025): 91–100.
- Dassucik, Dassucik, Dan Ida Farida. "Pengantar Ekonomi Pembangunan: Strategi Menuju Negara Berkembang." *Penerbit Tahta Media* 1, No. 1 (2025): 115–125.
- Diana, Fitri, Dan Hendra Riofita. "Riset Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran Telkomsel." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, No. 5 (2024).
- Huda, Roy Abdul, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, Dan Anas Malik. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang." *Kalianda Halok Gagas* 7, No. 2 (2024): 189–201.
- Kusuma, M Aldi Jaya. "Tantangan Pembangunan Dan Hukum Di Indonesia Pasca Pandemic Covid-19." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, No. 2 (2022): 100–108.
- Mutiara, Amanda, Imel Santika Siregar, Maysa Chairani, Luthfia Masfa Nur, Yauma Afriyanti, Dan Tasya Nadilla. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, No. 7 (2024): 212–226.
- Nurhayana, Eri, Dan Daryono Soebagiyo. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022." *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 4, No. 2 (2023): 106–119.
- Puspitasari, Lela. "Instrumen Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2025): 61–75.
- Rahadiano, Jalaluddin Iman, Ignatia Martha Hendrati, Dan Wiry Wardaya. "Analisis Multiplier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kontribusi Ekonomi Di Negara-Negara G20 Berdasarkan Teori Keynes." *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, No. 1 (2026): 158–169.
- Riofita, Hendra. "Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 2, No. 1 (2016): 85–104.
- Riofita, Hendra. "Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions." *Muslim Business And Economic Review* 1, No. 2 (2022): 257–280.
- Riofita, Hendra. "Strategi Pemasaran." In *Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra*, 2015.

Ella Amelia, Hendra Riofita: Peran Kebijakan Fiskal dalam Mempengaruhi Pendapatan Nasional: Kajian Ekonomi Publik di Indonesia

Riyadi, Aldi. “Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 10, No. 1 (2026): 48–59.

Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, Dan Arif Fadilla. “Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation* 1, No. 4 (2024): 1–10.